

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang dan Amerika Serikat mempunyai sejarah yang menarik dalam hubungan militernya. Pada awalnya Amerika Serikat (AS) dan Jepang merupakan musuh pada masa Perang Dunia II. Berdasarkan kemenangan-kemenangan yang telah Jepang terima dari perang-perangnya terdahulu membuat Jepang berani menyerang AS dengan cara menyerang pangkalan militer *Pearl Harbour* pada tanggal 7 Desember 1941 di Hawaii yang merupakan pangkalan laut terbesar di Pasifik. AS mengalami kehilangan yang besar yaitu ratusan kapal AS rusak bahkan ada yang hancur dan AS juga harus menerima kenyataan kehilangan ribuan pasukan Amerika Serikat yang tewas karena serangan tersebut. Kemudian itu yang memicu adanya Perang Dunia II, Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk menggunakan Bom Atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945.¹ Kemampuan bom atom ini diluar apa yang dibayangkan oleh Jepang, Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan kota terbesar di Jepang ini menjadi hancur. 2,5 juta jiwa korban meninggal akibat bom atom ini dan jutaan lainnya harus menanggung rasa sakit seumur hidup karena radiasi. Semua yang ada di kedua kota tersebut porak poranda. Kejadian ini membuat Jepang mempunyai masa kelam dan terpuruk. Pasca bom Atom di jatuhkan maka menciptakan sejarah Dunia, seperti menenggelamkan salah satu kekuatan yang besar pada masa itu yakni Jepang. Dengan kalahnya Jepang maka pada tahun 1947-1974 negara Negara yang menjadi Negara jajahan menggunakan kekalahan Jepang sebagai momen merdekanya mereka. Bisa dikatakan bahwa pada saat itu Jepang kalah telak atas AS.

¹ <http://www.history.com/topics/world-war-ii/bombing-of-hiroshima-and-nagasaki>

Setelah Jepang mengalami kekalahan dan mengharuskan Jepang untuk menyerah kepada AS. Pengakuan kekalahan Jepang secara formal di Kapal USS Missouri teluk Tokyo disampaikan Mamoru Shigemitsu dan Gen Umezu pada tanggal 2 September 1945 (Deklarasi Postdam) Deklarasi Postdam disusun di Jerman oleh 3 tokoh besar dunia yakni Presiden AS Harry S. Truman , Kepala Negara China Chiang Kai-Shek, dan Perdana menteri Inggris Yaitu Winston Churchill. Tidak hanya 3 tokoh tersebut namun pemimpin Uni soviet Joseph Stanlin juga datang pada saat Deklarasi Postdam namun Stanlin tidak ikut menandatangani Deklarasi ini dikarenakan Uni soviet tidak ikut berperang dengan Jepang pada Perang Dunia II. Kemudian Jepang juga harus menandatangani Perjanjian San Frasco pada tanggal 8 September 1951² yang juga ditanda tangani oleh 49 negara dan dengan itu secara resmi mengakhiri Perang Dunia II, dan mengakhiri kedudukan Jepang sebagai negara yang mempunyai kekuatan imperialis. Salah satu isi dari perjanjiannya adalah negara Jepang berada didalam pengawasan Amerika Serikat. Dengan begitu militer Jepang berarti Jepang harus menutup militernya dan tidak diberikan hak membangun angkatan senjata untuk berperang. Jepang hanya diberikan hak untuk mempunyai militer “*self defense*”³ yaitu militer yang hanya di gunakan ketika negaranya berada dalam serangan negara lain, maka kekuatan yang dipunyai Jepang paska kekalahannya dalam Perang Dunia II adalah sebatas pada pengaman dalam negeri dan seluruh pengendalian operasionalnya di bawah kekuasaan sipil.⁴

Pasifisme menuntut Jepang untuk tidak ikut campur dalam penatanaan keamanan dalam berbagai konflik internasional. Dengan adanya situasi ini maka mengharuskan Jepang untuk mempunyai kerjasama militer dengan negara super power yakni Amerika Serikat, sebagai penjamin keamanan negara Jepang.

² <http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm> “San Frasco Treaty”

³ Militer sebagai pertahanan Negara sendiri bukan untuk menyerang.

⁴ Sugeng Riyanto, Evolusi Sistem Pertahanan Jepang , Yogyakarta: Prudent Media, 2012 hlm 31

Pada pasal 9 konstitusi 1947 dijelaskan bahwa pemerintah Jepang menolak adanya perang didalam pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya pelarangan terhadap agresi dan menolak semua kekuatan militer. Dengan adanya perjanjian San Fransisco dan juga pasal 9 konstitusi Jepang ini membuat Jepang tidak mempunyai militer yang kuat untuk negaranya sehingga mengharuskan Jepang untuk beraliansi dengan Amerika Serikat di bidang keamanan. Oleh sebab itu di Jepang banyak terdapat pangkalan militer AS, setidaknya ada 23 pangkalan militer AS di negara Jepang⁵. Dari 23 pangkalan militer AS di Jepang, paling besar terdapat di daerah Okinawa.

Okinawa merupakan sebuah pulau di Jepang yang terletak pada selatan kepulauan Jepang dan 1500 km dari Tokyo. Luas pulau Okinawa adalah panjang 100 km dan lebar 15 km, dengan kata lain Okinawa hanya 0,6% dari luas Jepang .

Walaupun Okinawa merupakan daerah yang padat penduduknya namun 75% pangkalan militer AS di Jepang berada di pulau okinawa dan kurang lebih 26.000 tentara AS beserta 21.000 sanak saudaranya di Jepang. Tentunya itu menimbulkan konflik untuk daerah Okinawa.

Penduduk asli Okinawa meminta kepada pemerintah untuk memindahkan pangkalan militer AS keluar dari Okinawa, yaitu ketempat yang lebih sepi dan tidak ramai penduduk seperti di Okinawa. Pada jaman dahulu sebelum Okinawa menjadi bagian prefektur dari Jepang Okinawa merupakan sebuah kerajaan yang bernama Ryukyu yang sebenarnya berdiri sendiri kemudian karena letaknya yang juga dekat dengan Taiwan maka dulu ada perebutan pengklaim. Tahun 2006 AS sudah melakukan pertemuan untuk peyusunan kembali aliansi militer AS yang sudah berada di Okinawa pada tahun 1952. Pada pertemuan itu sudah disepakati bahwa 9000 personil militer AS akan dipindah dari Okinawa ke 3 daerah di Asia Pasifik yaitu Guam, Hawaii, dan Australia dan biaya yang akan disebabkan oleh relokasi ini

⁵ <https://militarybases.com/japan/>

akan ditanggung oleh kedua Negara Yakni Jepang dan AS. Salah satu alat untuk kedua Negara ini berunding adalah SCC (*Security Conculative Committee*) yang dimulai pada tahun 1997. SCC merupakan forum bilateral yang membahas tentang keamanan bilateral kedua Negara.

Pada tahun 2002 dipertemuan SCC topic bahasan kedua Negara adalah *Defence Policy Review Initiative* (DPRI) didalam DPRI AS menyatakan bahwa sangat ingin untuk memberantas Terorisme, dan pula akan metransformasi aliansi antara AS-Jepang mengenai pangkalan militernya di Okinawa, yaitu AS setuju untuk memindahkan sebagian personil militer keluar dari Okinawa tepatnya ke Guam pada tahun 2006 nanti.

Terjadi perselisihan antara pemerintah Jepang dengan pemerintah daerah Okinawa, yaitu pemerintah Jepang menyetujui untuk merelokasi pangkalan militer Futenma ke tempat yang lebih sepi penduduknya yaitu ke daerah Henoko, namun gubernur dari Okinawa sendiri menginginkan bahwa militer AS benar benar tidak ada lagi di pulau tersebut seperti apa yang menjadi tuntutan warga Okinawa.

Adapun hal hal yang membuat pemerintah Okinawa ingin pangkalan militer AS untuk di relokasi keluar dari Okinawa adalah karena masalah domestik yang ditimbulkan akibat keberadaan pangkalan militer AS. Awalnya pada tahun 1995 terjadi tindak pemerkosaan dengan korban warga Jepang berusia 12 tahun oleh personil militer AS. Hal tersebut menimbulkan banyak kecaman di Pulau Okinawa, banyak masyarakat yang melakukan demo untuk mengecam tindak kriminal yang dilakukan oleh personil militer tersebut. Dua partai di Jepang yang juga mengecam bahwa militer AS harus segera di relokasikan antara lain adalah Partai Demokrasi Jepang dan Partai Demokrasi Sosial. Mereka menuntut pemerintah Jepang untuk merevisi ulang *Status of Forces Agreement* (SOFA) dan meninjau kembali tentang tambahan teritori yang dimiliki oleh militer AS didalam wilayah Jepang. Selain kasus kasus kriminal dan tekanan dari partai partai tuntutan pemindahan militer AS dari Okinawa juga disebabkan oleh biaya APBN yang dihabiskan oleh pemerintah Jepang untuk membiayai

Militer AS yang berada di Okinawa, Hampir dari 65% biaya yang dikeluarkan dari militer AS harus ditanggung oleh Pemerintah Jepang.

Hal hal ini sudah sejak lama menjadi perdebatan yang sengit antara pemerintahan Jepang dan pemerintah daerah Okinawa. Dimulai pada tahun 1996 terjadi kesepakatan antara AS dan Jepang untuk menutup Futenma dan memindahkan fasilitasnya ke negara lain. Meskipun Jepang dan AS telah sepakat untuk memindahkan pangkalan militer Futenma pada tahun 1996 namun hal ini harus tertunda beberapa kali karena adanya tentangan dari warga sekitar lokasi baru yang tidak ingin daerahnya menjadi bising akibat aktivitas militer. Hingga Jepang berhasil untuk bernegosiasi kepada AS bahwa pada tahun 2006, 9000 militer AS di Okinawa akan dipindahkan ke 3 tempat yaitu Guam, Hawaii dan Darwin. Dengan adanya hasil besar yang pemerintah Jepang dapatkan tidak serta merta membuat tuntutan agar Militer AS dipindahkan dari Okinawa menyurut. Para Masyarakat tetap ingin bahwa daerah Okinawa benar benar bersih dari militer AS. Dilihat dari latar belakang masalah ini, penulis merasa ingin untuk membahas apa yang membuat Jepang tetap mempertahankan Militer AS di Jepang terkhusus di daerah Okinawa, padahal banyak hal yang tidak menguntungkan untuk Jepang seperti pembengkakan APBN, kasus Kriminal, dan banyaknya kecaman yang ada. Dilihat dari sikap Jepang yang tetap mempertahankan militer AS bisa dikatakan bahwa Jepang sudah pasti mempunyai alasan sendiri dan alasan tersebut sudah pasti sangat penting. Sehingga didalam skripsi ini penulis akan membahas alasan alasan apa saja yang dipunyai Jepang dalam mempertahankan pangkalan militer AS di Okinawa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

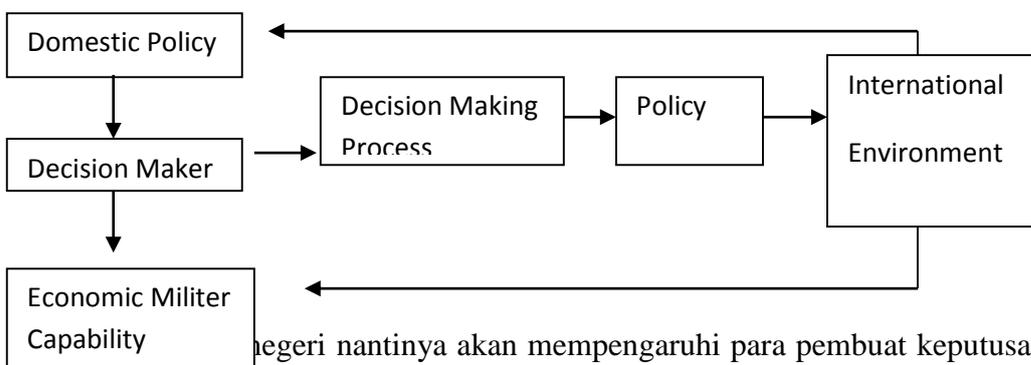
“Mengapa pemerintah Jepang mempertahankan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa?”

C. Landasan Teori

1. Decision Making Proses

Menurut William D. Coplin tindakan politik luar negeri bisa dipandang sebagai akibat dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri termasuk dengan faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua adalah kondisi ekonomi dan militer di Negara tersebut, termasuk pada faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan atau keamanan suatu Negara. Dan ketiga, konteks internasional, yakni situasi di Negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari Negara Negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Berikut grafik untuk memperjelas mengenai tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri.

Gambar 1.1 diagram teori pembuatan kebijakan politik luar negeri



kegiatan politik luar negeri nantinya akan mempengaruhi para pembuat keputusan lalu akan mempengaruhi pada kemampuan ekonomi dan militernya kemudian para pembuat keputusan ini akan melakukan proses pembuatan keputusan yang nantinya menghasilkan sebuah keputusan yang akan mempengaruhi lingkungan internasionalnya.

Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, terdapat tiga model, yaitu:

The democratic model; pluralist model; dan ruling elite model.

1. Democratic model

model ini berpegang bahwa suatu kebijakan itu merefleksikan pilihan-pilihan publik melalui proses pemilu dan institusi-institusi perwakilan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan ini, berbagai kebijakan diformulasikan '*by the people and for the people*', dan pemerintah adalah penyambung mulut terpercaya masyarakat. Namun, ada hal yang tidak terbukti dari pernyataan di atas karena banyak rakyat yang tidak ikut memilih, dan para pejabat tidak selalu punya persepsi akurat atas pilihan-pilihan publik, atau mengabaikannya sama sekali. *Democratic model* cenderung naif dan bahkan lebih sulit untuk diaplikasikan pada arena yang lebih tertutup dari *foreign policy-making* dibanding wilayah kebijakan lain.

2. *Pluralist model*,

Pada model ini mayoritas publik tidak mendapat informasi, tidak tertarik, dan tidak pula aktif dalam *decision-making process*. Pengaruh mereka ada ditangan kelompok-kelompok kepentingan, masing-masing merepresentasikan satu bagian dari masyarakat. Pembuatan keputusan terdiri dari *bargaining and compromise* diantara pusat-pusat persekutuan kekuasaan. Kekuasaan terdesentralisasi, didistribusikan dalam beberapa segi, seperti kesejahteraan, pengetahuan, dan kepentingan. Disini, mayoritas publik tidak terlibat. Model ini telah dikritik karena terlalu bersandar pada ukuran empiris dan *behaviourism*, saat beroperasi dibawah asumsi-asumsi normatif yang meragukan dan tidak demokratis. Sebagaimana dalam model sebelumnya, kebijakan luar negeri kurang sesuai dalam kerangka ini dibanding kesesuaiannya pada kebijakan domestik. Namun, kemampuan pluralisme untuk memahami salah satu sistem politik terkompleks di dunia, dan komprominya atas demokrasi ideal dan berbagai realitas politik yang keras, telah menjadikannya satu eksplanasi yang lebih populer dari yang lain.

3. *Ruling elite model*

Model ini berasumsi bahwa keberadaan elit politik yang relatif kecil dan bersatu akan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya melalui pilihan-pilihan kebijakannya. Elit terkadang terdiri dari sedikit keluarga kaya, terkadang berbentuk apa yang disebut "military industrial complex", mungkin juga actor-aktor dari kelompok yang lebih berbeda. Para elit pada dasarnya konservatif dan hanya akan menyetujui perubahan-perubahan yang menguntungkan dalam kebijakan.

Dalam pengambilan keputusan model pluralist terdapat aktor-aktor kepentingan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri disebut dengan "*policy influencers*". Menurut D.Coplin juga menjelaskan *policy influencer system* merupakan aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pengambil keputusan dengan *policy influencers* terjadi secara timbal balik. Di satu sisi, pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers* karena mereka merupakan sumber dukungan baginya. Di sisi lain, *policy influencers* membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan tuntutan diputuskan sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan *policy influencers* tidak dipenuhi pengambil keputusan, maka dapat dipastikan sebagian atau bahkan seluruh dukungan *policy influencers* kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu.

Dalam pengambilan keputusan model pluralist terdapat aktor-aktor kepentingan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri disebut dengan "*policy influencers*". Menurut D.Coplin juga menjelaskan *policy influencer system* merupakan aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pengambil keputusan dengan *policy influencers*

terjadi secara timbal balik. Di satu sisi, pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers* karena mereka merupakan sumber dukungan baginya. Di sisi lain, *policy influencers* membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan tuntutan diputuskan sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan *policy influencers* tidak dipenuhi pengambil keputusan, maka dapat dipastikan sebagian atau bahkan seluruh dukungan *policy influencers* kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu

Politik dalam negeri Jepang yang masih memakai konstitusi pasal 9 dan menolak adanya perang maka hal ini yang mempengaruhi para pembuat keputusan di Jepang yakni Pemerintah Jepang. Dengan kemampuan militer yang dipunyai oleh Jepang mempengaruhi proses pembuatan keputusan yang kemudian terciptalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jepang untuk Pangkalan militer AS di Okinawa. Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan untuk tetap mempertahankan pangkalan militer AS di Okinawa. Kebijakan tersebut berpengaruh pada lingkungan internasional yakni dalam skripsi ini lingkungan internasional yang dimaksud adalah AS. AS menyetujui kebijakan pemerintah Jepang yang tetap mempertahankan pangkalan militernya di Okinawa. Walaupun banyaknya tuntutan warga Okinawa yang ingin memindahkan pangkalan militer AS keluar dari pulauanya namun pemerintah Jepang harus mengesampingkan tuntutan domestik yaitu tuntutan warga Okinawa demi melindungi kepentingan nasional Jepang.

2. Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan tujuan pemerintah suatu negara dalam menciptakan kesejahteraan di negaranya dalam tingkat internasional (Oppenheim, 1998). Kepentingan

nasional merupakan sesuatu yang abstrak yang bentuknya tidak jelas dan tidak bisa ditunjukkan begitu saja, begitu juga tujuan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan.

Menurut Hans J Morgenthau, Kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Kepentingan nasional merupakan hasil kompromi politik antara berbagai pihak dalam suatu negara yang berbeda kepentingannya. Kepentingan nasional diartikan sebagai kemampuan minimum negara bangsa dalam melindungi identitas fisik (wilayah, tanah, territorial), identitas politik (rezim ekonomi politik) dan identitas kulturalnya (norma etnis, linguistik, sejarah) dari gangguan negara bangsa lain. Kepentingan nasional biasanya terdapat dalam setiap konstitusi negara sehingga harus diperjuangkan oleh setiap entitas yang ada negara tersebut. Sedangkan dalam konstitusi Amerika Serikat menurut Morgenthau, kepentingan nasional ada dua poin yaitu pertama adalah kesejahteraan secara umum dan yang kedua adalah proses hukum. Dengan begitu ada dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor yang menuntut secara rasional dan kemudian akan menjadi kebutuhan Negara tersebut dan lainnya dapat berubah karena akan dipengaruhi oleh situasinya.

Di dalam dunia yang dipenuhi banyak Negara yang saling bersaing dan berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan hidup Negara Negara tersebut, bersaing dan berkompetisi merupakan hal hal yang menjadi syarat minimal dan penting yang harus mereka lakukan "*Thus all nations do what they cannot help but do: protect their physical, political and cultural identity against encroachments by other nations*"⁶ yang mana berarti bahwa para Negara melakukan apa yang tak bisa mereka hindari yaitu melindungi identitas fisik, politik dan budaya mereka dari Negara lain. Situasinya menjadi tidak sama dikarenakan faktor yang

⁶ Hans J. Morgenthau, "The Mainsprings of American Foreign Policy: The National Interest vs. Moral Abstractions," *The American Political Science Review*, XLIV (December, 1950), 840-1. Hereafter cited as APSR XLIV.

mudah berubah dari kepentingan internasional itu sendiri, Konsep kepentingan sendiri merupakan substansi politik dan oleh karena itu menjadi abadi dan tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Kata kunci yang paling utama dalam kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup. Negara menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan dalam memajukan kesejahteraan. Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional sehingga dapat berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut⁷.

Kepentingan nasional itu tercipta tidak lain dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Selain itu kepentingan nasional suatu Negara juga dipengaruhi oleh histori Negara tersebut. Seperti Negara Jepang yang mempunyai histori harus menelan kekalahan perang dunia ke II kemudian mengharuskan Jepang untuk menandatangani perjanjian San Fransisco yang antara lain mengharuskan militer Jepang harus di bawah pengawasan Amerika Serikat.

Dalam bukunya, Mohtar Mas’oed menjelaskan konsep ini sama dengan menjalankan kelangsungan hidup. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kelangsungan hidup tercipta dari

⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 8

adanya kemampuan minimum. Kemampuan minimum tersebut dapat dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain. Hal tersebut menjelaskan bagaimana sebuah kepentingan dapat menghasilkan kemampuan akan menilai kebutuhan maupun keinginan pribadi yang sejalan dengan itu berusaha menyeimbangkan akan kebutuhan maupun keinginan dilain pihak. Konsep ini juga menjelaskan seberapa luas cakupan dan seberapa jauh sebuah kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya. Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka, memiliki kegunaan-kegunaan. Hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang mana kegunaan pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengancam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan.⁸

Menganalisis sikap pemerintah Jepang yang tetap ingin mempertahankan pangkalan militer AS di Okinawa tidak lain dikarenakan oleh Pemerintah Jepang yang sedang melakukan *self preservation* yang mana adalah pembelaan diri Negara Jepang dalam melindungi wilayahnya dari agresi militer China dan Korea Utara yang semakin lama semakin besar. Dikarenakan letak Okinawa yang dekat dengan Laut Pasifik itu menjadikan daerah Okinawa sebagai kawasan yang strategis untuk menjaga Laut Cina Selatan.

D. Hipotesa

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah maka dapat di tarik hipotesa bahwa Jepang mempertahankan pangkalan militer AS di Okinawa dikarenakan Jepang sedang melindungi kepentingan nasionalnya dengan melakukan Self Preservation dari China yang mempunyai perseteruan dengan Jepang mengenai pulau Senkaku dan Korea Utara yang

⁸ Mochtar Mas'ood. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Hal. 34

militernya semakin tahun semakin besar. Kebijakan Luar negeri ini dilakukan Jepang di karenakan keterbatasan militer Jepang dan mengharuskan Jepang membiarkan pangkalan militer AS di Okinawa.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada tahun 2013 hingga pada tahun 2016. Tahun 2013 terjadi persetujuan antara pemerintah Jepang dengan AS untuk memindahkan pangkalan militer AS yang berada di Futenma ke Henoko. Namun warga Okinawa menolaknya dan melakukan tuntutan agar pangkalan militer AS tidak lagi berada didalam Prefektur Okinawa. Kemudian pada tahun 2015 hingga 2016 terjadi demo yang besar di Okinawa menuntut pemulangan serta ditutupnya pangkalan militer diseluruh prefektur Okinawa.

Negara Jepang merupakan negara yang menarik bila ditilik dari segi militernya. Jepang sempat mempunyai militer yang kuat dan melawan AS namun dikarenakan kekalahannya di Perang Dunia II maka mengharuskan Jepang untuk melucuti senjata yang Jepang punya dan berganti menjadi negara yang hanya punya militer sebagai *self defense* dan harus bergantung kepada musuh masa lalunya saat perang dunia II yaitu AS.

Penelitian ini memilih Negara AS karena AS adalah negara yang mempunyai kekuatan yang besar dan menjadi menarik ketika pemerintah daerah Okinawa dengan pemerintahan Jepang mempunyai pikiran yang berbeda mengenai adanya pangkalan militer di AS.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan data kuantitatif yaitu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai sumber dan berbagai cara dan penulis menggunakan sumber sekunder yaitu sumber yang merupakan sumber yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Penulis memperoleh data melalui berita, artikel pdf, halaman resmi Negara, lembaga internasional, buku offline dan buku online.

Dan unit analisisnya adalah *nation state* dimana penulis mengambil negara Jepang sebagai bahan tulisannya.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Motif Jepang yang ingin mempertahankan pangkalan militer AS di Okinawa

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, teori, hipotesa, batasan masalah, metode penelitian, sistematika penulisan dan kerangka penulisan

Bab II akan membahas tentang aliansi militer antara Jepang dan Amerika Serikat dimulai dari sejarahnya, Dinamika yang ada di aliansi militer Jepang dan sikap pemerintah Jepang terhadap penolakan pangkalan militer di Okinawa.

Bab III akan membahas mengenai Kepentingan Amerika Serikat dalam pangkalan militer di Okinawa beserta Dampak yang ditimbulkan dari kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat, dan Tuntutan Warga Okinawa pada tahun 2015-2016.

Bab IV akan membahas tentang self preservation yang dilakukan Jepang demi melindungi diri dari Korea Utara dan China keterbatasan militer Jepang dan

Bab V kesimpulan secara keseluruhan dari bab I, bab II, bab III, dan bab IV.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Jepang dan Amerika Serikat mempunyai sejarah yang menarik dalam hubungan militernya. Pada awalnya Amerika Serikat (AS) dan Jepang merupakan musuh pada masa Perang Dunia II. Berdasarkan kemenangan-kemenangan yang telah Jepang terima dari perang-perangnya terdahulu membuat Jepang berani menyerang AS dengan cara menyerang pangkalan militer *Pearl Harbour* pada tanggal 7 Desember 1941 di Hawaii yang merupakan pangkalan laut terbesar di Pasifik. AS mengalami kehilangan yang besar yaitu ratusan kapal AS rusak bahkan ada yang hancur dan AS juga harus menerima kenyataan kehilangan ribuan pasukan Amerika Serikat yang tewas karena serangan tersebut. Kemudian itu yang memicu adanya Perang Dunia II, Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk menggunakan Bom Atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945.⁹ Kemampuan bom atom ini diluar apa yang dibayangkan oleh Jepang, Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan kota terbesar di Jepang ini menjadi hancur. 2,5 juta jiwa korban meninggal akibat bom atom ini dan jutaan lainnya harus menanggung rasa sakit seumur hidup karena radiasi. Semua yang ada di kedua kota tersebut porak poranda. Kejadian ini membuat Jepang mempunyai masa kelam dan terpuruk. Pasca bom Atom di jatuhkan maka menciptakan sejarah Dunia, seperti menenggelamkan salah satu kekuatan yang besar pada masa itu yakni Jepang. Dengan kalahnya Jepang maka pada tahun 1947-1974 negara Negara yang menjadi Negara jajahan menggunakan kekalahan Jepang sebagai momen merdekanya mereka. Bisa dikatakan bahwa pada saat itu Jepang kalah telak atas AS.

⁹ <http://www.history.com/topics/world-war-ii/bombing-of-hiroshima-and-nagasaki>

Setelah Jepang mengalami kekalahan dan mengharuskan Jepang untuk menyerah kepada AS. Pengakuan kekalahan Jepang secara formal di Kapal USS Missouri teluk Tokyo disampaikan Mamoru Shigemitsu dan Gen Umezu pada tanggal 2 September 1945 (Deklarasi Postdam) Deklarasi Postdam disusun di Jerman oleh 3 tokoh besar dunia yakni Presiden AS Harry S. Truman , Kepala Negara China Chiang Kai-Shek, dan Perdana menteri Inggris Yaitu Winston Churchill. Tidak hanya 3 tokoh tersebut namun pemimpin Uni soviet Joseph Stanlin juga datang pada saat Deklarasi Postdam namun Stanlin tidak ikut menandatangani Deklarasi ini dikarenakan Uni soviet tidak ikut berperang dengan Jepang pada Perang Dunia II. Kemudian Jepang juga harus menandatangani Perjanjian San Frasco pada tanggal 8 September 1951¹⁰ yang juga ditanda tangani oleh 49 negara dan dengan itu secara resmi mengakhiri Perang Dunia II, dan mengakhiri kedudukan Jepang sebagai negara yang mempunyai kekuatan imperialis. Salah satu isi dari perjanjiannya adalah negara Jepang berada didalam pengawasan Amerika Serikat. Dengan begitu militer Jepang berarti Jepang harus menutup militernya dan tidak diberikan hak membangun angkatan senjata untuk berperang. Jepang hanya diberikan hak untuk mempunyai militer “*self defense*”¹¹ yaitu militer yang hanya di gunakan ketika negaranya berada dalam serangan negara lain, maka kekuatan yang dipunyai Jepang paska kekalahannya dalam Perang Dunia II adalah sebatas pada pengaman dalam negeri dan seluruh pengendalian operasionalnya di bawah kekuasaan sipil.¹²

Pasifisme menuntut Jepang untuk tidak ikut campur dalam penatanaan keamanan dalam berbagai konflik internasional. Dengan adanya situasi ini maka mengharuskan Jepang untuk mempunyai kerjasama militer dengan negara super power yakni Amerika Serikat, sebagai penjamin keamanan negara Jepang.

¹⁰ <http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm> “San Frasco Treaty”

¹¹ Militer sebagai pertahanan Negara sendiri bukan untuk menyerang.

¹² Sugeng Riyanto, Evolusi Sistem Pertahanan Jepang , Yogyakarta: Prudent Media, 2012 hlm 31

Pada pasal 9 konstitusi 1947 dijelaskan bahwa pemerintah Jepang menolak adanya perang didalam pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya pelarangan terhadap agresi dan menolak semua kekuatan militer. Dengan adanya perjanjian San Fransisco dan juga pasal 9 konstitusi Jepang ini membuat Jepang tidak mempunyai militer yang kuat untuk negaranya sehingga mengharuskan Jepang untuk beraliansi dengan Amerika Serikat di bidang keamanan. Oleh sebab itu di Jepang banyak terdapat pangkalan militer AS, setidaknya ada 23 pangkalan militer AS di negara Jepang¹³. Dari 23 pangkalan militer AS di Jepang, paling besar terdapat di daerah Okinawa.

Okinawa merupakan sebuah pulau di Jepang yang terletak pada selatan kepulauan Jepang dan 1500 km dari Tokyo. Luas pulau Okinawa adalah panjang 100 km dan lebar 15 km, dengan kata lain Okinawa hanya 0,6% dari luas Jepang .

Walaupun Okinawa merupakan daerah yang padat penduduknya namun 75% pangkalan militer AS di Jepang berada di pulau okinawa dan kurang lebih 26.000 tentara AS beserta 21.000 sanak saudaranya di Jepang. Tentunya itu menimbulkan konflik untuk daerah Okinawa.

Penduduk asli Okinawa meminta kepada pemerintah untuk memindahkan pangkalan militer AS keluar dari Okinawa, yaitu ketempat yang lebih sepi dan tidak ramai penduduk seperti di Okinawa. Pada jaman dahulu sebelum Okinawa menjadi bagian prefektur dari Jepang Okinawa merupakan sebuah kerajaan yang bernama Ryukyu yang sebenarnya berdiri sendiri kemudian karena letaknya yang juga dekat dengan Taiwan maka dulu ada perebutan pengklaim. Tahun 2006 AS sudah melakukan pertemuan untuk peyusunan kembali aliansi militer AS yang sudah berada di Okinawa pada tahun 1952. Pada pertemuan itu sudah disepakati bahwa 9000 personil militer AS akan dipindah dari Okinawa ke 3 daerah di Asia Pasifik yaitu Guam, Hawaii, dan Australia dan biaya yang akan disebabkan oleh relokasi ini

¹³ <https://militarybases.com/japan/>

akan ditanggung oleh kedua Negara Yakni Jepang dan AS. Salah satu alat untuk kedua Negara ini berunding adalah SCC (*Security Conculative Committee*) yang dimulai pada tahun 1997. SCC merupakan forum bilateral yang membahas tentang keamanan bilateral kedua Negara.

Pada tahun 2002 dipertemuan SCC topic bahasan kedua Negara adalah *Defence Policy Review Initiative* (DPRI) didalam DPRI AS menyatakan bahwa sangat ingin untuk memberantas Terorisme, dan pula akan metransformasi aliansi antara AS-Jepang mengenai pangkalan militernya di Okinawa, yaitu AS setuju untuk memindahkan sebagian personil militer keluar dari Okinawa tepatnya ke Guam pada tahun 2006 nanti.

Terjadi perselisihan antara pemerintah Jepang dengan pemerintah daerah Okinawa, yaitu pemerintah Jepang menyetujui untuk merelokasi pangkalan militer Futenma ke tempat yang lebih sepi penduduknya yaitu ke daerah Henoko, namun gubernur dari Okinawa sendiri menginginkan bahwa militer AS benar benar tidak ada lagi di pulau tersebut seperti apa yang menjadi tuntutan warga Okinawa.

Adapun hal hal yang membuat pemerintah Okinawa ingin pangkalan militer AS untuk di relokasi keluar dari Okinawa adalah karena masalah domestik yang ditimbulkan akibat keberadaan pangkalan militer AS. Awalnya pada tahun 1995 terjadi tindak pemerkosaan dengan korban warga Jepang berusia 12 tahun oleh personil militer AS. Hal tersebut menimbulkan banyak kecaman di Pulau Okinawa, banyak masyarakat yang melakukan demo untuk mengecam tindak kriminal yang dilakukan oleh personil militer tersebut. Dua partai di Jepang yang juga mengecam bahwa militer AS harus segera di relokasikan antara lain adalah Partai Demokrasi Jepang dan Partai Demokrasi Sosial. Mereka menuntut pemerintah Jepang untuk merevisi ulang *Status of Forces Agreement* (SOFA) dan meninjau kembali tentang tambahan teritori yang dimiliki oleh militer AS didalam wilayah Jepang. Selain kasus kasus kriminal dan tekanan dari partai partai tuntutan pemindahan militer AS dari Okinawa juga disebabkan oleh biaya APBN yang dihabiskan oleh pemerintah Jepang untuk membiayai

Militer AS yang berada di Okinawa, Hampir dari 65% biaya yang dikeluarkan dari militer AS harus ditanggung oleh Pemerintah Jepang.

Hal hal ini sudah sejak lama menjadi perdebatan yang sengit antara pemerintahan Jepang dan pemerintah daerah Okinawa. Dimulai pada tahun 1996 terjadi kesepakatan antara AS dan Jepang untuk menutup Futenma dan memindahkan fasilitasnya ke negara lain. Meskipun Jepang dan AS telah sepakat untuk memindahkan pangkalan militer Futenma pada tahun 1996 namun hal ini harus tertunda beberapa kali karena adanya tentangan dari warga sekitar lokasi baru yang tidak ingin daerahnya menjadi bising akibat aktivitas militer. Hingga Jepang berhasil untuk bernegosiasi kepada AS bahwa pada tahun 2006, 9000 militer AS di Okinawa akan dipindahkan ke 3 tempat yaitu Guam, Hawaii dan Darwin. Dengan adanya hasil besar yang pemerintah Jepang dapatkan tidak serta merta membuat tuntutan agar Militer AS dipindahkan dari Okinawa menyurut. Para Masyarakat tetap ingin bahwa daerah Okinawa benar benar bersih dari militer AS. Dilihat dari latar belakang masalah ini, penulis merasa ingin untuk membahas apa yang membuat Jepang tetap mempertahankan Militer AS di Jepang terkhusus di daerah Okinawa, padahal banyak hal yang tidak menguntungkan untuk Jepang seperti pembengkakan APBN, kasus Kriminal, dan banyaknya kecaman yang ada. Dilihat dari sikap Jepang yang tetap mempertahankan militer AS bisa dikatakan bahwa Jepang sudah pasti mempunyai alasan sendiri dan alasan tersebut sudah pasti sangat penting. Sehingga didalam skripsi ini penulis akan membahas alasan alasan apa saja yang dipunyai Jepang dalam mempertahankan pangkalan militer AS di Okinawa.

J. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

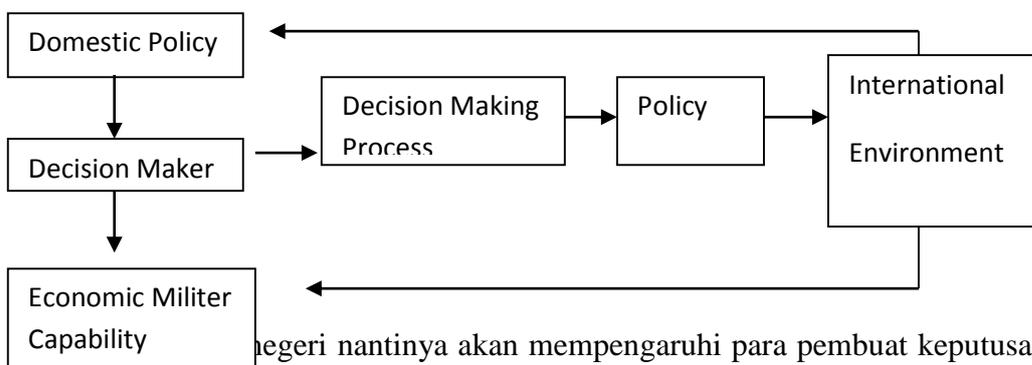
“Mengapa pemerintah Jepang mempertahankan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa?”

K. Landasan Teori

3. Decision Making Proses

Menurut William D. Coplin tindakan politik luar negeri bisa dipandang sebagai akibat dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri termasuk dengan faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua adalah kondisi ekonomi dan militer di Negara tersebut, termasuk pada faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan atau keamanan suatu Negara. Dan ketiga, konteks internasional, yakni situasi di Negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari Negara Negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Berikut grafik untuk memperjelas mengenai tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri.

Gambar 1.1 diagram teori pembuatan kebijakan politik luar negeri



kegiatan politik luar negeri nantinya akan mempengaruhi para pembuat keputusan lalu akan mempengaruhi pada kemampuan ekonomi dan militernya kemudian para pembuat keputusan ini akan melakukan proses pembuatan keputusan yang nantinya menghasilkan sebuah keputusan yang akan mempengaruhi lingkungan internasionalnya.

Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, terdapat tiga model, yaitu:

The democratic model; pluralist model; dan ruling elite model.

4. Democratic model

model ini berpegang bahwa suatu kebijakan itu merefleksikan pilihan-pilihan publik melalui proses pemilu dan institusi-institusi perwakilan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan ini, berbagai kebijakan diformulasikan '*by the people and for the people*', dan pemerintah adalah penyambung mulut terpercaya masyarakat. Namun, ada hal yang tidak terbukti dari pernyataan di atas karena banyak rakyat yang tidak ikut memilih, dan para pejabat tidak selalu punya persepsi akurat atas pilihan-pilihan publik, atau mengabaikannya sama sekali. *Democratic model* cenderung naif dan bahkan lebih sulit untuk diaplikasikan pada arena yang lebih tertutup dari *foreign policy-making* dibanding wilayah kebijakan lain.

5. *Pluralist model*,

Pada model ini mayoritas publik tidak mendapat informasi, tidak tertarik, dan tidak pula aktif dalam *decision-making process*. Pengaruh mereka ada ditangan kelompok-kelompok kepentingan, masing-masing merepresentasikan satu bagian dari masyarakat. Pembuatan keputusan terdiri dari *bargaining and compromise* diantara pusat-pusat persekutuan kekuasaan. Kekuasaan terdesentralisasi, didistribusikan dalam beberapa segi, seperti kesejahteraan, pengetahuan, dan kepentingan. Disini, mayoritas publik tidak terlibat. Model ini telah dikritik karena terlalu bersandar pada ukuran empiris dan *behaviourism*, saat beroperasi dibawah asumsi-asumsi normatif yang meragukan dan tidak demokratis. Sebagaimana dalam model sebelumnya, kebijakan luar negeri kurang sesuai dalam kerangka ini dibanding kesesuaiannya pada kebijakan domestik. Namun, kemampuan pluralisme untuk memahami salah satu sistem politik terkompleks di dunia, dan komprominya atas demokrasi ideal dan berbagai realitas politik yang keras, telah menjadikannya satu eksplanasi yang lebih populer dari yang lain.

6. *Ruling elite model*

Model ini berasumsi bahwa keberadaan elit politik yang relatif kecil dan bersatu akan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya melalui pilihan-pilihan kebijakannya. Elit terkadang terdiri dari sedikit keluarga kaya, terkadang berbentuk apa yang disebut "military industrial complex", mungkin juga actor-aktor dari kelompok yang lebih berbeda. Para elit pada dasarnya konservatif dan hanya akan menyetujui perubahan-perubahan yang menguntungkan dalam kebijakan.

Dalam pengambilan keputusan model pluralist terdapat aktor-aktor kepentingan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri disebut dengan "*policy influencers*". Menurut D.Coplin juga menjelaskan *policy influencer system* merupakan aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pengambil keputusan dengan *policy influencers* terjadi secara timbal balik. Di satu sisi, pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers* karena mereka merupakan sumber dukungan baginya. Di sisi lain, *policy influencers* membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan tuntutan diputuskan sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan *policy influencers* tidak dipenuhi pengambil keputusan, maka dapat dipastikan sebagian atau bahkan seluruh dukungan *policy influencers* kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu.

Dalam pengambilan keputusan model pluralist terdapat aktor-aktor kepentingan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri disebut dengan "*policy influencers*". Menurut D.Coplin juga menjelaskan *policy influencer system* merupakan aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pengambil keputusan dengan *policy influencers*

terjadi secara timbal balik. Di satu sisi, pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers* karena mereka merupakan sumber dukungan baginya. Di sisi lain, *policy influencers* membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan tuntutan mereka diputuskan sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan *policy influencers* tidak dipenuhi pengambil keputusan, maka dapat dipastikan sebagian atau bahkan seluruh dukungan *policy influencers* kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu

Politik dalam negeri Jepang yang masih memakai konstitusi pasal 9 dan menolak adanya perang maka hal ini yang mempengaruhi para pembuat keputusan di Jepang yakni Pemerintah Jepang. Dengan kemampuan militer yang dipunyai oleh Jepang mempengaruhi proses pembuatan keputusan yang kemudian terciptalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jepang untuk Pangkalan militer AS di Okinawa. Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan untuk tetap mempertahankan pangkalan militer AS di Okinawa. Kebijakan tersebut berpengaruh pada lingkungan internasional yakni dalam skripsi ini lingkungan internasional yang dimaksud adalah AS. AS menyetujui kebijakan pemerintah Jepang yang tetap mempertahankan pangkalan militernya di Okinawa. Walaupun banyaknya tuntutan warga Okinawa yang ingin memindahkan pangkalan militer AS keluar dari pulauanya namun pemerintah Jepang harus mengesampingkan tuntutan domestik yaitu tuntutan warga Okinawa demi melindungi kepentingan nasional Jepang.

4. Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan tujuan pemerintah suatu negara dalam menciptakan kesejahteraan di negaranya dalam tingkat internasional (Oppenheim, 1998). Kepentingan

nasional merupakan sesuatu yang abstrak yang bentuknya tidak jelas dan tidak bisa ditunjukkan begitu saja, begitu juga tujuan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan.

Menurut Hans J Morgenthau, Kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Kepentingan nasional merupakan hasil kompromi politik antara berbagai pihak dalam suatu negara yang berbeda kepentingannya. Kepentingan nasional diartikan sebagai kemampuan minimum negara bangsa dalam melindungi identitas fisik (wilayah, tanah, territorial), identitas politik (rezim ekonomi politik) dan identitas kulturalnya (norma etnis, linguistik, sejarah) dari gangguan negara bangsa lain. Kepentingan nasional biasanya terdapat dalam setiap konstitusi negara sehingga harus diperjuangkan oleh setiap entitas yang ada negara tersebut. Sedangkan dalam konstitusi Amerika Serikat menurut Morgenthau, kepentingan nasional ada dua poin yaitu pertama adalah kesejahteraan secara umum dan yang kedua adalah proses hukum. Dengan begitu ada dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor yang menuntut secara rasional dan kemudian akan menjadi kebutuhan Negara tersebut dan lainnya dapat berubah karena akan dipengaruhi oleh situasinya.

Di dalam dunia yang dipenuhi banyak Negara yang saling bersaing dan berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan hidup Negara Negara tersebut, bersaing dan berkompetisi merupakan hal hal yang menjadi syarat minimal dan penting yang harus mereka lakukan "*Thus all nations do what they cannot help but do: protect their physical, political and cultural identity against encroachments by other nations*"¹⁴ yang mana berarti bahwa para Negara melakukan apa yang tak bisa mereka hindari yaitu melindungi identitas fisik, politik dan budaya mereka dari Negara lain. Situasinya menjadi tidak sama dikarenakan faktor yang

¹⁴ Hans J. Morgenthau, "The Mainsprings of American Foreign Policy: The National Interest vs. Moral Abstractions," *The American Political Science Review*, XLIV (December, 1950), 840-1. Hereafter cited as APSR XLIV.

mudah berubah dari kepentingan internasional itu sendiri, Konsep kepentingan sendiri merupakan substansi politik dan oleh karena itu menjadi abadi dan tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Kata kunci yang paling utama dalam kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup. Negara menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan dalam memajukan kesejahteraan. Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional sehingga dapat berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut¹⁵.

Kepentingan nasional itu tercipta tidak lain dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Selain itu kepentingan nasional suatu Negara juga dipengaruhi oleh histori Negara tersebut. Seperti Negara Jepang yang mempunyai histori harus menelan kekalahan perang dunia ke II kemudian mengharuskan Jepang untuk menandatangani perjanjian San Fransisco yang antara lain mengharuskan militer Jepang harus di bawah pengawasan Amerika Serikat.

Dalam bukunya, Mohtar Mas’oed menjelaskan konsep ini sama dengan menjalankan kelangsungan hidup. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kelangsungan hidup tercipta dari

¹⁵ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 8

adanya kemampuan minimum. Kemampuan minimum tersebut dapat dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain. Hal tersebut menjelaskan bagaimana sebuah kepentingan dapat menghasilkan kemampuan akan menilai kebutuhan maupun keinginan pribadi yang sejalan dengan itu berusaha menyeimbangkan akan kebutuhan maupun keinginan dilain pihak. Konsep ini juga menjelaskan seberapa luas cakupan dan seberapa jauh sebuah kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya. Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka, memiliki kegunaan-kegunaan. Hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang mana kegunaan pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengancam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan.¹⁶

Menganalisis sikap pemerintah Jepang yang tetap ingin mempertahankan pangkalan militer AS di Okinawa tidak lain dikarenakan oleh Pemerintah Jepang yang sedang melakukan *self preservation* yang mana adalah pembelaan diri Negara Jepang dalam melindungi wilayahnya dari agresi militer China dan Korea Utara yang semakin lama semakin besar. Dikarenakan letak Okinawa yang dekat dengan Laut Pasifik itu menjadikan daerah Okinawa sebagai kawasan yang strategis untuk menjaga Laut Cina Selatan.

L. Hipotesa

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah maka dapat di tarik hipotesa bahwa Jepang mempertahankan pangkalan militer AS di Okinawa dikarenakan Jepang sedang melindungi kepentingan nasionalnya dengan melakukan Self Preservation dari China yang mempunyai perseteruan dengan Jepang mengenai pulau Senkaku dan Korea Utara yang

¹⁶ Mochtar Mas'oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Hal. 34

militernya semakin tahun semakin besar. Kebijakan Luar negeri ini dilakukan Jepang di karenakan keterbatasan militer Jepang dan mengharuskan Jepang membiarkan pangkalan militer AS di Okinawa.

M. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada tahun 2013 hingga pada tahun 2016. Tahun 2013 terjadi persetujuan antara pemerintah Jepang dengan AS untuk memindahkan pangkalan militer AS yang berada di Futenma ke Henoko. Namun warga Okinawa menolaknya dan melakukan tuntutan agar pangkalan militer AS tidak lagi berada didalam Prefektur Okinawa. Kemudian pada tahun 2015 hingga 2016 terjadi demo yang besar di Okinawa menuntut pemulangan serta ditutupnya pangkalan militer diseluruh prefektur Okinawa.

Negara Jepang merupakan negara yang menarik bila ditilik dari segi militernya. Jepang sempat mempunyai militer yang kuat dan melawan AS namun dikarenakan kekalahannya di Perang Dunia II maka mengharuskan Jepang untuk melucuti senjata yang Jepang punya dan berganti menjadi negara yang hanya punya militer sebagai *self defense* dan harus bergantung kepada musuh masa lalunya saat perang dunia II yaitu AS.

Penelitian ini memilih Negara AS karena AS adalah negara yang mempunyai kekuatan yang besar dan menjadi menarik ketika pemerintah daerah Okinawa dengan pemerintahan Jepang mempunyai pikiran yang berbeda mengenai adanya pangkalan militer di AS.

N. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan data kuantitatif yaitu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai sumber dan berbagai cara dan penulis menggunakan sumber sekunder yaitu sumber yang merupakan sumber yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Penulis memperoleh data melalui berita, artikel pdf, halaman resmi Negara, lembaga internasional, buku offline dan buku online.

Dan unit analisisnya adalah *nation state* dimana penulis mengambil negara Jepang sebagai bahan tulisannya.

O. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Motif Jepang yang ingin mempertahankan pangkalan militer AS di Okinawa

P. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, teori, hipotesa, batasan masalah, metode penelitian, sistematika penulisan dan kerangka penulisan

Bab II akan membahas tentang aliansi militer antara Jepang dan Amerika Serikat dimulai dari sejarahnya, Dinamika yang ada di aliansi militer Jepang dan sikap pemerintah Jepang terhadap penolakan pangkalan militer di Okinawa.

Bab III akan membahas mengenai Kepentingan Amerika Serikat dalam pangkalan militer di Okinawa beserta Dampak yang ditimbulkan dari kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat, dan Tuntutan Warga Okinawa pada tahun 2015-2016.

Bab IV akan membahas tentang self preservation yang dilakukan Jepang demi melindungi diri dari Korea Utara dan China keterbatasan militer Jepang dan

Bab V kesimpulan secara keseluruhan dari bab I, bab II, bab III, dan bab IV.